



**POLITEKNIK POS INDONESIA**  
**JURNAL AKUNTANSI**

**TH XII / 02 / Oktober / 2019**

**ISSN 1979 - 8334**

**Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya)**

*Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala*

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500**

*Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin*

**Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung)**

*Christine Riani Elisabeth, Nurhayati*

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara**

*Riani Tanjung, Nindhy Putri Pratama*

**Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018**

*Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal*

**Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ**

*Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran*

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi**

*Ade Pipit Fatmavati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi*

**Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016**

*Jaka Maulana, Deden Egiani*

**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016**

*Marismiati, Dwi Putra Mahardika*

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (Warehouse) PT Bio Farma (Persero)**

*Muhammad Rizal Satria, Najamudin Perbowo*

**Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia**

*Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth*

**Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018**

*Tia Setiani, Rika Nurul Madila*



Jurnal Akuntansi	Tahun XII	Nomor 02	Bandung, Oktober 2019	ISSN 1979-8334
------------------	-----------	----------	-----------------------	----------------

# JURNAL AKUNTANSI

TH XII / 02 / Oktober / 2019

ISSN : 1979-8334

---

---

Setiap tahun terbit dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Berisi hasil penelitian dan kajian analisis di bidang Akuntansi.

## **SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI :**

### **Pelindung**

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

### **Penanggung Jawab**

Y. Casmadi.,SE., MM.

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak.

### **Anggota**

Surya Ramadhan Noor, SE, M.M

Toto Suwarsa, SE,Ak,M.M

Indra Firmansyah, SE, Ak, MM

Dewi Selviani Y, SS. M.Pd.

Rukmi Juwita, SE., M.Si., Ak., CA.

Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.

Ade Pipit Fatmawati, SE, M.Pd

M. Rizal Satria, SE, M.Ak, Ak

Marismiati, SE, M.Si

Jaka Maulana, SE. M.Ak, CA, CPSAK

Diana Maryana, SE, M.Si

Riani Tanjung, SE, M.Si, Ak. CA

Christine Riani Elisabeth, SE, M.M

Tia Setiana , S.Pd M.M

## **ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI :**

Jurusan Akuntansi, Gedung Pendidikan,

Politeknik Pos Indonesia

Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-20009568,

E-mail : poltekpos@jurusanakuntansi.com

---

**Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No. 006/BAN-PT/Ak.V/Dpl-III/VI/2005**

## **KATA PENGANTAR**

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 6 (enam) topik, meliputi :

Akuntansi Keuangan  
Akuntansi Biaya  
Perpajakan  
Auditing  
Manajemen Keuangan  
Sistem Akuntansi

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Amin

Bandung, Oktober 2019

Redaksi

**JURNAL AKUNTANSI**  
**ISSN: 19798334**  
**TH XII / 02 / Oktober / 2019**

---

<b>Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya)</b> <i>Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala</i>	1
<b>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500</b> <i>Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin</i>	11
<b>Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung)</b> <i>Christine Riani Elisabeth, Nurhayati</i>	21
<b>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara</b> <i>Riani Tanjung, Nindhya Putri Pratama</i>	29
<b>Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018</b> <i>Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal</i>	40
<b>Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ</b> <i>Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran</i>	51
<b>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi</b> <i>Ade Pipit Fatmawati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi</i>	60
<b>Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016</b> <i>Jaka Maulana, Deden Egiani</i>	68
<b>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016</b> <i>Marismiati, Dwi Putra Mahardika</i>	78

<b>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (<i>Warehouse</i>) PT Bio Farma (Persero)</b>	87
<i>Muhammad Rizal Satria, Najamudin Prabowo</i>	
<b>Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia</b>	94
<i>Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth</i>	
<b>Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018</b>	103
<i>Tia Setiani, Rika Nurul Madila</i>	

# **ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIMAH PERIODE 2009-2018**

Tia Setiani, Rika Nurul Madila

Email : [tiasetiani@poltekpos.ac.id](mailto:tiasetiani@poltekpos.ac.id), [rikanurul419@gmail.com](mailto:rikanurul419@gmail.com)

---

## **ABSTRAK**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan munculnya era baru tersebut, menuntut Negara Indonesia untuk menganut asas desentralisasi. Dimana asas desentralisasi dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mempublikasikan laporan kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah realisasi APBD sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi; dan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dilihat dari realisasi pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Realisasi pendapatan telah melebihi jumlah yang dianggarkan dengan presentase rata-rata sudah diatas 90%. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 sudah dikatakan cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan daerah 2) Realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 sudah dikatakan cukup baik dalam mengelola sumber pengeluaran daerah. 3) Tingkat kemandirian pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 rata-rata sebesar 22,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian masih tergolong sangat rendah.

**Kata Kunci:** Realisasi, Anggaran, Pendapatan, Belanja Daerah

## **1.1 PENDAHULUAN**

### **1.1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat atau bisa menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dengan munculnya era baru tersebut, menuntut Negara Indonesia untuk menganut asas desentralisasi. Dimana asas desentralisasi dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah secara leluasa dapat mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Saat ini, banyak pemerintah daerah yang sudah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Namun, ada juga pemerintah daerah yang belum mampu mengelola kinerja keuangan daerahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwasanya pengelolaan keuangan negara di daerah saat ini masih belum efisien. Diantaranya terbukti pada tahun 2010 terlihat dari realisasi belanja daerah yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Salah satunya belanja pegawai yang lebih besar ketimbang belanja modal. Beberapa kabupaten itu terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Hal ini salah satunya dikarenakan urusan pendidikan lebih diutamakan sebagai urusan daerah. Lalu beliau juga ungkap bahwasanya penyerapan anggaran pemerintahan daerah juga belum optimal. Serapan anggaran yang tidak optimal tersebut merupakan salah satu fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Cimahi merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan adanya

permasalahan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah kota Cimahi masih sangat rendah dalam menggali PAD nya. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya daerah tersebut belum mandiri dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah karena tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi.

### 1.1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi belanja daerah pada Pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009-2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian Pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009-2018.

## 1.2 METODE PENELITIAN

### 1.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009-2018.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* yakni *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2018:84) “*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Sugiyono (2018:85) menyatakan “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dalam penelitian ini sampel yang diteliti adalah data anggaran dan realisasi pendapatan daerah, anggaran dan realisasi belanja daerah serta realisasi PAD yang ada di dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009-2018.

### 1.2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis varians (selisih) pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, analisis varians (selisih) belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah untuk menganalisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2009-2018.

Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

1. Analisis varian (selisih) pendapatan. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan yang dianggarkan.
2. Analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam

$$\frac{\text{Pendapatan tahun} - \text{Pendapatan tahun lalu}}{\text{Pendapatan tahun lalu}} \times 100\%$$

tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

3. Analisis varian (selisih) belanja daerah. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja daerah dengan yang dianggarkan.

Realisasi belanja- anggaran belanja

4. Analisis pertumbuhan belanja daerah. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

$$\frac{\text{Pertumbuhan Belanja} = \text{Belanja tahun} - \text{Belanja tahun lalu}}{\text{Belanja tahun lalu}} \times 100\%$$

5. Rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

### **1.3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.3.1 Hasil Analisis Data**

1. Analisis varian (selisih) pendapatan daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 2009-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.1.
2. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.2.
3. Analisis varian (selisih) belanja daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.3.

4. Analisis pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.4
5. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.5.

### 1.3.2 Pembahasan

1. Analisis varian (selisih) pendapatan daerah Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018. Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018. Suatu pemerintah dapat dikatakan dengan baik dalam mengelola sumber pemasukannya, apabila realisasi pendapatan daerahnya melebihi jumlah yang dianggarkan. Dalam hal ini dapat dilihat Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2009-2018 sudah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerah karena rata-rata persentase sudah diatas 90% meskipun masih ada yang belum terlampaui target anggarannya.
2. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018. Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi

dan pertumbuhan positif. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi dikatakan cukup baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya baik itu Pendapatan Asli Daerah (seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain), Dana Perimbangan (seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain) dan Lain-Lain pendapatan yang sah walaupun persentase pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2009 ke tahun 2010 pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 4,63%, Untuk tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 16,50%, Untuk tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 20,89%, Untuk tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 11,78%, Untuk tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 14,53%, Untuk tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 6,23%, Untuk tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 2,71%, Untuk tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 21,54% dan Untuk tahun 2017 ke tahun 2018

sebesar 11,16%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita juga dan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah/retribusi daerah.

3. Analisis varian (selisih) belanja daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018. Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018. Suatu pemerintah dapat dikatakan dengan baik dalam mengelola sumber pengeluarannya, apabila realisasi pendapatan daerahnya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Dalam hal ini dapat dilihat Pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2009-2018 dikatakan cukup baik karena realisasi belanja daerah tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan program/kegiatan yang terjadi setiap tahunnya juga

tak terduga. Misalnya ketika terjadi bencana alam maka belanja tak terduga pada tahun saat bencana alam itu terjadi akan terserap tinggi.

4. Analisis pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018. Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kota Cimahi tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi dan pertumbuhan positif. Artinya Pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2009-2018 dalam mengelola pengeluaran daerah/ belanja daerah dikatakan cukup baik dalam merealisasikan belanja daerahnya baik itu belanja modal, belanja pegawai dan belanja tak terduga walaupun persentase pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan yang positif yang menyebabkan kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam membiayai

penyelenggaraan urusan daerah juga meningkat dan dalam penyusunan sistem tata kelola keuangan daerah baik itu pemasukan maupun pengeluaran daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Cimahi telah tersusun secara sistematis dan terstruktur.

5. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah kota Cimahi periode 2009-2018. Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Cimahi dari tahun 2009-2018 sebesar 22,65% yang dapat dikatakan masih sangat rendah. Artinya, sumber pemasukan daerah pada Pemerintah Kota Cimahi masih belum maksimal didapatkan. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain yang dapat digali oleh Pemerintah Kota Cimahi

pada tahun itu dan campuran dari Pemerintah Pusat masih dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2009, bantuan Pemerintah Pusat (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah) sebesar Rp 592.066.884.241 dari total pendapatan daerah, tahun 2010 sebesar Rp 619.489.082.478 dari total pendapatan daerah, tahun 2011 sebesar Rp 721.746.717.931 dari total pendapatan daerah, tahun 2012 sebesar Rp 872.552.563.936 dari total pendapatan daerah, tahun 2013 sebesar Rp 975.350.197.043 dari total pendapatan daerah, tahun 2014 sebesar Rp 1.117.121.948.297 dari total pendapatan daerah, tahun 2015 sebesar Rp 917.988.057.336 dari total pendapatan daerah dan tahun 2016 sebesar Rp 932.945.044.734 dari total pendapatan daerah, tahun 2017 sebesar Rp 1.097.735.902.678 dari total pendapatan daerah, tahun 2018 sebesar Rp 981.213.945.995 dari total

pendapatan daerah Hal ini juga dikarenakan masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

## **1.4 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1.4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya serta hasil pengamatan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Cimahi, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan daerah telah melebihi jumlah yang dianggarkan dengan persentase rata-rata sudah diatas 90%. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2009-2018 sudah dikatakan cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
2. Realisasi belanja daerah tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Artinya, Pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2009-2018 dikatakan sudah mampu dalam mengelola pengeluaran daerahnya.
3. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Cimahi dari rasio PAD

terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi dari tahun 2009-2018 rata-rata sebesar 22,65% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Cimahi masih tergolong sangat rendah. Bantuan pemerintah pusat/provinsi selalu meningkat dan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan PAD. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa campur tangan pemerintah pusat dalam urusan keuangan daerah masih dominan, namun sedikit demi sedikit mulai berkurang.

### **1.4.2 Saran**

Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti beberapa tahun anggaran dengan bentuk dan susunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama agar tidak mengalami kesulitan dalam perhitungannya karena masalah perbedaan data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Halim & Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bunga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Fikri. 2017. *Kemenkeu Ungkap Kebobrokan Daerah dalam kelola APBD*, (Online), ([http://www.viva.co.id/arsip/980303-kemenkeu-ungkap-kebobrokan-daerah](http://www.viva.co.id/arsip/980303-kemenkeu-ungkap-kebobrokan-daerah-dalam-kelola-apbd) dalam-kelola-apbd, diakses 20 Juni 2019)
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiana. 2017. *Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin*, (Online), (<http://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/44/41/>, diakses 20 Juni 2019)
- Muryanti, Kiki. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sajow, Cenissa. dkk. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan*

- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*, (Online), (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/871/621> diakses 14 Juli 2019)
- Saputra, Dori. 2014. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*, (Online), (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/2056>, diakses 16 Juni 2019).
- Sinambela, Elizar. dkk. 2016. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Sumatera Utara*, (Online), (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/2056>, diakses 16 Juni 2019).